



OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung

LAPORAN KINERJA

2025



0811 973 3737
0717 9114193



Ombudsman RI Bangka Belitung

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang maha Esa karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah- Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bangka Belitung Tahun 2025, sebagaimana mestinya sesuai dengan amanah Pasal 42 Ayat (2) dan Ayat (5) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah.

Kami sangat berharap Laporan Kinerja Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bangka Belitung Tahun 2025 ini dapat menjadi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bangka Belitung Tahun 2025 ,dalam laporan ini kami juga menyediakan tabel, grafik, dan dokumentasi agar dapat mempermudah melihat persentasi dan mengukur kinerja Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung. Semoga laporan ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya laporan yang telah disusun ini dapat berguna bagi kami sendiri maupun orang lain yang mempunyai kepentingan atas laporan ini.

Pangkalpinang, 02 Februari 2026
Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

#

Kgs Chris Fither
Plt.Kepala Perwakilan

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2025 disusun untuk menyajikan informasi tentang capaian komitmen kinerja yang telah diperjanjikan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada pimpinan dan *stakeholders* selama tahun 2025. Laporan Kinerja ini disusun dengan mengacu kepada ketentuan PERPRES No. 29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, PERMENPAN No. 53/2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Persekjen Ombudsman RI No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Persekjen No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Ombudsman RI.

Tahun 2025 dalam Perjanjian Kinerja Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat 3 Sasaran Strategis yang dituangkan dalam 8 Indikator yang dilaksanakan. Berikut disajikan pencapaian realisasi dari 8 Indikator yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 :

Realisasi Perjanjian Kinerja Perwakilan Ombudsman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET/ SATUAN	REALISASI	CAPAIAN
Terwujudnya Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Efektif	Jumlah Focal Point Pengawasan Pelayanan Publik yang Dikembangkan oleh Perwakilan	1 Lembaga	1 Lembaga	100%
	Jumlah Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan Ombudsman RI Perwakilan	225 Laporan	287 Laporan	127,55 %

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET/ SATUAN	REALISASI	CAPAIAN
	Jumlah Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Perwakilan yang Dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik	1 Laporan	1 Laporan	100%
Terwujudnya Penguatan Pencegahan Maladministrasi Guna Perbaikan Pelayanan Publik	Jumlah Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik yang Dikeluarkan	1 Saran Kebijakan	1 Saran Kebijakan	100%
	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Terlibat Aktif dalam Upaya Pencegahan Maladministrasi	1 Kelompok Masyarakat	1 Kelompok Masyarakat	100%
	Jumlah Pemerintah Daerah yang Dinilai atas Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	8 Pemerintah Daerah	8 Pemerintah Daerah	100%
Terwujudnya Dukungan Manajemen Kelembagaan Ombudsman yang Kuat	Jumlah Layanan Pengelolaan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1 Layanan	Rp 351.883.340	99,39%
	Jumlah Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	1 Paket	1 Paket	100%

Pada Tahun Anggaran 2025, Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.028.581.000,- dengan blokir anggaran Rp. 318.626.000,-, sehingga pagu efektif menjadi Rp. 709.955.000,-. Berikut disajikan data realisasi anggaran Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 :

Realisasi Anggaran TA 2025

Kegiatan	Pagu Efektif	Realisasi Anggaran	Persentase Penerimaan
Jaringan Pengawasan Pelayanan Publik oleh Perwakilan	4.858.916	4.832.400	99,45%
Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan Ombudsman RI Perwakilan	155.039.577	154.992.905	99,97%
Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Perwakilan yang Dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik	15.184.262	15.157.000	99,82%
Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik	30.719.460	30.699.859	99,94%
Kelompok Masyarakat Peduli Maladministrasi di Perwakilan	5.578.950	5.562.148	99,70%
Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	84.301.448	84.111.392	99,77%
Layanan Perkantoran	354.049.422	351.883.340	99,39%
Layanan Sarana Internal	10.000.000	10.000.000	100,00%
JUMLAH	659.732.035	657.239.044	99,62%

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	v
Bab I Pendahuluan		
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Fungsi, Tugas, Dan Wewenang	2
1.3 Organisasi Dan Sumber Daya Manusia	3
Bab II Rencana Kinerja		
2.1 Perjanjian Kinerja	7
2.2 Penetapan Kinerja	9
Bab III Akuntabilitas Kinerja		
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja	11
3.2 Analisis Capaian Kinerja	12
3.3 Realisasi Anggaran	28
Bab IV Penutup	32
Lampiran	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ombudsman RI hadir sebagai mitra masyarakat tanpa membedakan status sosial dan ras karena non-diskriminasi bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam nilai Ombudsman RI dalam melayani. Tidak saja pada tahap penerimaan namun dalam segala pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik. Masih ada masyarakat mengira Ombudsman RI adalah nama orang, perusahaan swasta, atau lembaga swadaya masyarakat. Tentu ini bukan hal yang mengejutkan, pamor Ombudsman RI masih kalah dengan lembaga negara pengawas lainnya, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pengawasan Keuangan, dan sebagainya. Ketika dihadapkan pada fenomena seperti ini, menjadi tantangan sendiri bahwa masyarakat masih minim pengetahuan untuk memahami peran sertanya dalam pengawasan pemerintahan. Pada dasarnya masyarakat dapat menggunakan hak-haknya mengawasi pelayanan publik sekaligus meningkatkan dan memperbaiki kualitas pelayanan publik yang dirasa masih jauh dari pemerintahan yang bersih dan baik (good and clean governance). Agar mencapai tujuan tersebut, penting untuk menjelaskan sejarah dan perkembangan Ombudsman RI kepada masyarakat saat ini. Peran serta masyarakat perlu ditingkatkan agar mereka mendapatkan perlindungan hak-hak pelayanan publik dalam rangka menciptakan keadilan dan kesejahteraan. Bila dibandingkan dengan keluasan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seluas 81.725,6 Km² dan penduduk sebanyak 1.460.000 juta jiwa yang tersebar di 7 Kabupaten/Kota, 47 Kecamatan, 82 Kelurahan, dan 309 Desa maka kiprah Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas masih sangat kecil. Oleh karena itu memastikan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar lebih dikenal masyarakat dan mendorong partisipasi publik untuk terlibat aktif sebagai pengawas pelayanan publik sudah tidak bisa ditunda lagi.

1.2 Fungsi, Tugas, dan Wewenang

Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberitugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia) dan Pasal 10

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, Ombudsman RI mempunyai tugas menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, menindaklanjuti laporan/ pengaduan masyarakat yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman, melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik, dan melakukan koordinasi, kerja sama serta pengembangan jaringan kerja dengan lembaga negara atau lembaga pemerintah lainnya.

Sesuai ketentuan UU No.37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, mengenai Laporan Berkala dan Laporan Tahunan Ombudsman Republik Indonesia pada Bab VIII pasal 42, mengenai hubungan hierarkis Perwakilan Ombudsman dengan Ombudsman Republik Indonesia pada pasal 43 ayat (2), mengenai fungsi, tugas dan wewenang Ombudsman Republik Indonesia secara mutatis mutandis berlaku bagi perwakilan Ombudsman pada pasal 43 ayat (4), dan mengenai laporan Perwakilan Ombudsman pada pasal 10 ayat (2) PP RI No.21 Tahun 2011 Tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan.

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung dalam menjalankan fungsi dan tugasnya terdiri dari beberapa bidang kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan (PVL)
2. Keasistenan Pemeriksaan Laporan
3. Keasistenan Pencegahan Maladministrasi

1.3 Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia atau biasa disebut Insan Ombudsman RI Perwakilan Bangka Belitung terdiri atas Kepala Perwakilan, Asisten, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga pendukung. Pada bulan Juli tahun 2024 Ombudsman RI mengeluarkan Pengumuman Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Pendaftaran Seleksi Calon Asisten Ombudsman RI. Dalam pengumuman tersebut dibuka formasi sebanyak 6 (enam) orang Calon Asisten dengan unit penempatan di Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tahap seleksi calon asisten terdiri dari seleksi administrasi, tes CAT (*Computer Assisted Test*), psikotes, tes kesehatan, dan seleksi wawancara. Berikut data jumlah pegawai di Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung :

Tabel 1
Insan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2025

NO	JABATAN	JUMLAH
1.	Kepala Perwakilan	1
2.	Asisten	12
3.	PNS / CPNS	3
4.	Pramubhakti	2
5.	Satpam	2
6.	Tenaga Kebersihan	1
TOTAL		21 Orang

Tabel 2
Sebaran SDM Perwakilan Ombudsman RI
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Pendidikan Tahun 2025

No	JENJANG	JUMLAH
1	SMA Sederajat	4 Orang
2	Diploma III	2 Orang
3	Strata 1	11 Orang
4	Strata 2	4 Orang

Struktur organisasi Ombudsman RI Perwakilan di provinsi terdiri dari Kepala Perwakilan, Keasistenan (bidang penanganan laporan, pencegahan, dan pemeriksaan), serta Sekretariat. Dipimpin oleh Kepala Perwakilan, struktur ini didukung oleh Asisten Ombudsman dan staf untuk memproses laporan masyarakat terkait maladministrasi, pengawasan pelayanan publik, dan mediasi.

Berikut adalah komponen struktur organisasi Perwakilan Ombudsman secara umum:

- Kepala Perwakilan

Memimpin dan bertanggung jawab atas kinerja Ombudsman di tingkat provinsi.

- Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan (PVL)

Menerima, memverifikasi, dan melakukan pemeriksaan terhadap laporan masyarakat.

- Keasistenan Pencegahan Maladministrasi

Melakukan langkah-langkah pencegahan maladministrasi.

- Keasistenan Pemeriksaan

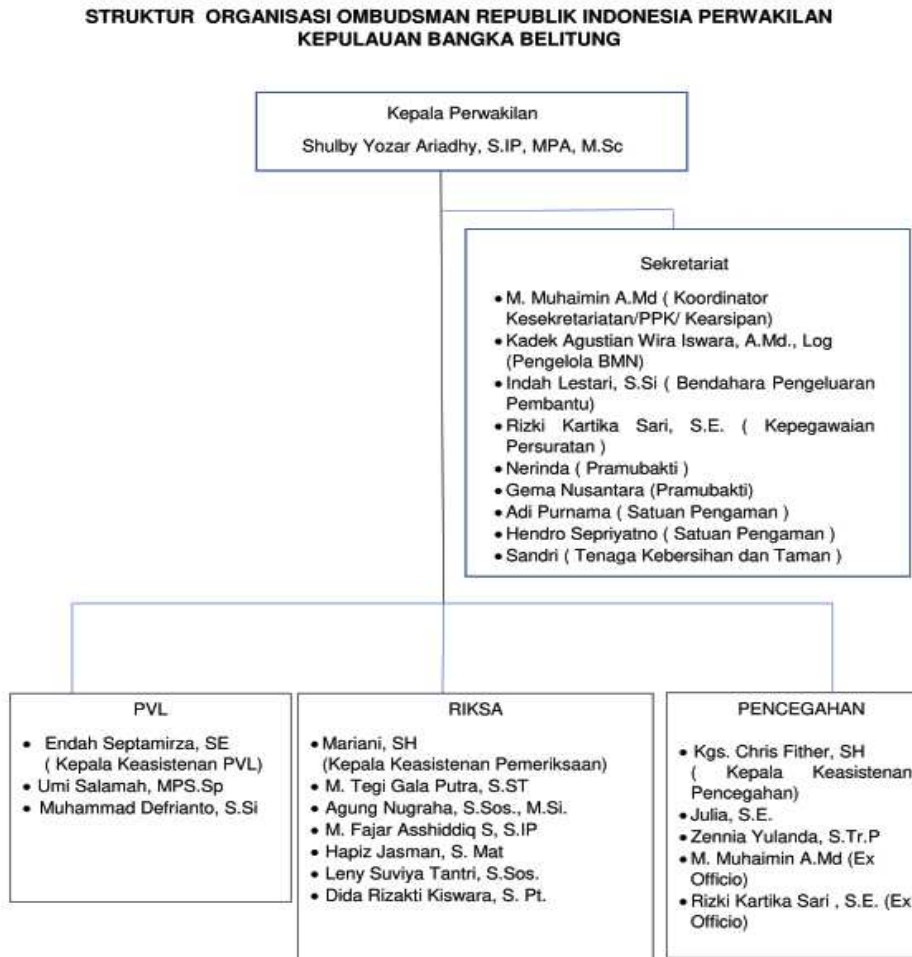
Melakukan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik.

- Sekretariat Perwakilan

Mendukung tugas administrasi dan operasional.

Setiap pimpinan satuan organisasi dan asisten di bawahnya bertanggung jawab atas laporan dan tugas yang diberikan, serta berkoordinasi langsung dengan pusat.

Gambar 1
Struktur Organisasi Perwakilan Ombudsman RI
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025



BAB II

RENCANA KERJA

2.1 Perjanjian Kinerja

Berdasarkan data laporan akhir tahun 2025 dan awal 2026, Perjanjian Kinerja Ombudsman RI tahun 2025 berfokus pada penguatan pengawasan pelayanan publik melalui peningkatan penyelesaian laporan masyarakat, transformasi penilaian, dan penguatan kelembagaan. Berikut adalah poin-poin penting perjanjian kinerja Ombudsman RI tahun 2025:

1. Target Penyelesaian Laporan Masyarakat

Ombudsman RI menetapkan target tinggi untuk penyelesaian laporan masyarakat, dengan capaian di berbagai perwakilan melampaui target nasional.

2. Transformasi Penilaian Pelayanan Publik (2025)

Mulai tahun 2025 Ombudsman RI melakukan perubahan pendekatan dari Survei Kepatuhan Pelayanan Publik menjadi Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

3. Sasaran Strategis Utama 2025, yakni :

- Penguatan Pengawasan:

Mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik, terutama di daerah melalui peningkatan kompetensi dan manajemen.

- Rekomendasi:

Ombudsman berhasil mendorong tingkat pelaksanaan rekomendasi mencapai 81% selama periode 2021-2025.

- Dukungan Manajemen:

Perjanjian kinerja juga mencakup peningkatan nilai SAKIP dan Reformasi Birokrasi, meskipun masih terkendala struktur organisasi yang belum terpenuhi maksimal di pusat maupun perwakilan.

4. Isu Prioritas

- Penyelesaian kasus perizinan pertambangan di kawasan IKN.
- Penyelesaian sengketa tanah/lahan.
- Pengawasan program investasi dan hilirisasi nasional.

Perjanjian ini bertujuan untuk memastikan setiap unit layanan publik tidak hanya tertib administratif tetapi berdampak secara substantif bagi masyarakat

2.2 Penetapan Kinerja

Berpedoman kepada RKP tahun 2023, Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung menyusun Perjanjian Kinerja yang merupakan acuan pencapaian keberhasilan kinerja Perjanjian kinerja tahun 2025 yakni sebagai berikut:

Tabel 4
Perjanjian Kinerja 2025
Perwakilan Ombudsman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET/ SATUAN
Terwujudnya Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Efektif	Jumlah Focal Point Pengawasan Pelayanan Publik yang Dikembangkan oleh Perwakilan	1 Lembaga
	Jumlah Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan Ombudsman RI Perwakilan	225 Laporan
	Jumlah Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Perwakilan yang Dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik	1 Laporan
Terwujudnya Penguatan Pencegahan Maladministrasi Guna Perbaikan Pelayanan Publik	Jumlah Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik yang Dikeluarkan	1 Saran Kebijakan
	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Terlibat Aktif dalam Upaya Pencegahan Maladministrasi	1 Kelompok Masyarakat
	Jumlah Pemerintah Daerah yang Dinilai atas Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	8 Pemerintah Daerah

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET/ SATUAN
Terwujudnya Dukungan Manajemen Kelembagaan Ombudsman yang Kuat	Jumlah Layanan Pengelolaan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1 Layanan
	Jumlah Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	1 Paket

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Analisis Kinerja

Capaian Kinerja Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 sesuai Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dengan sasaran Terwujudnya Pelayanan Publik yang Berkualitas Melalui Pengawasan Ombudsman RI.

Tabel 5
Realisasi Pencapaian Perjanjian Kinerja
Tahun 2025

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET/ SATUAN	REALISASI	CAPAIAN
Terwujudnya Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Efektif	Jumlah Focal Point Pengawasan Pelayanan Publik yang Dikembangkan oleh Perwakilan	1 Lembaga	1 Lembaga	100%
	Jumlah Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan Ombudsman RI Perwakilan	225 Laporan	287 Laporan	127,55 %
	Jumlah Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Perwakilan yang Dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik	1 Laporan	1 Laporan	100%
Terwujudnya Penguatan Pencegahan Maladministrasi	Jumlah Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik yang Dikeluarkan	1 Saran Kebijakan	1 Saran Kebijakan	100%

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET/ SATUAN	REALISASI	CAPAIAN
Guna Perbaikan Pelayanan Publik	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Terlibat Aktif dalam Upaya Pencegahan Maladministrasi	1 Kelompok Masyarakat	1 Kelompok Masyarakat	100%
	Jumlah Pemerintah Daerah yang Dinilai atas Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	8 Pemerintah Daerah	8 Pemerintah Daerah	100%
Terwujudnya Dukungan Manajemen Manajemen Kelembagaan Ombudsman yang Kuat	Jumlah Layanan Pengelolaan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1 Layanan	Rp 351.883.340	99,39%
	Jumlah Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	1 Paket	1 Paket	100%

3.2. Capaian Kinerja

1. Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan

Keasistenan penerimaan dan verifikasi laporan adalah unit yang bertugas melakukan penerimaan laporan, pemeriksaan administratif dan substantif yang berkaitan dengan kewenangan Ombudsman Republik Indonesia untuk menentukan laporan dapat ditindaklanjuti ke tahap pemeriksaan oleh Ombudsman Republik Indonesia.

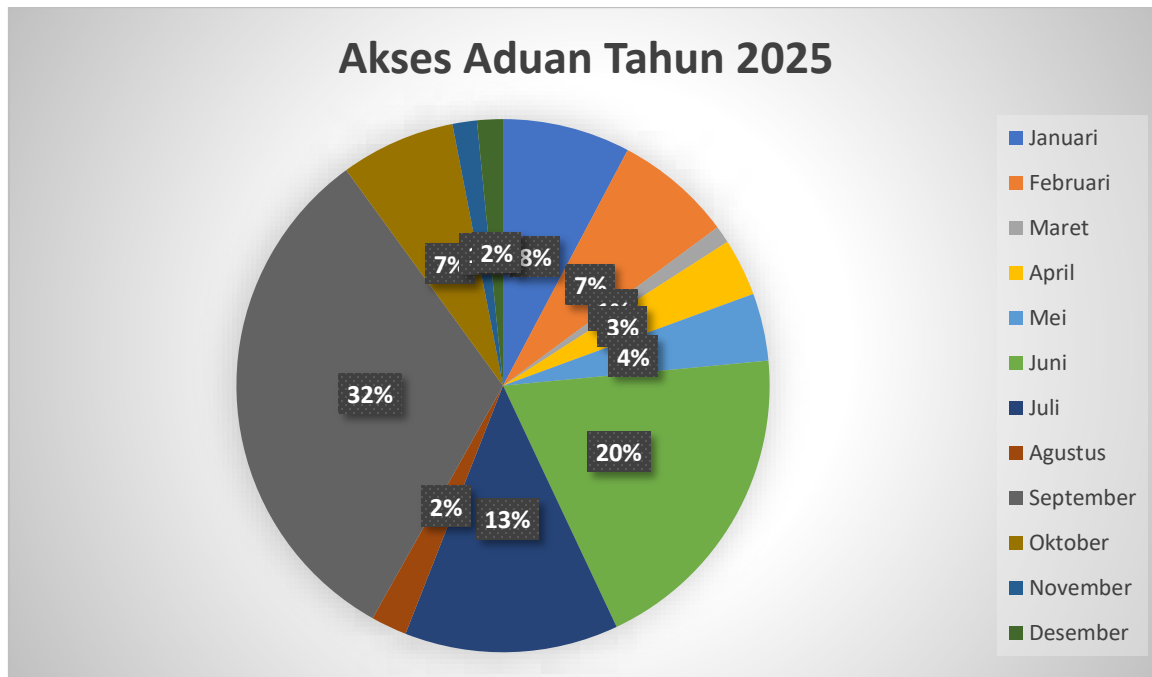
a. Jumlah akses masyarakat kepada Ombudsman

Pada tahun 2025, jumlah aduan yang diterima Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung berjumlah 1.149 aduan. Terdapat penurunan jumlah penerimaan aduan jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang menerima 1.313 aduan.

Tabel 6
Jumlah Akses Masyarakat di Kantor Perwakilan Ombudsman RI Per-Bulan
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025

No	Bulan	Jumlah
1	Januari	89 Aduan
2	Februari	82 Aduan
3	Maret	12 Aduan
4	April	40 Aduan
5	Mei	47 Aduan
6	Juni	224 Aduan
7	Juli	149 Aduan
8	Agustus	25 Aduan
9	September	366 Aduan
10	Oktober	80 Aduan
11	November	17 Aduan
12	Desember	18 Aduan
Total		1.149 Aduan

Grafik 1
Jumlah Akses Masyarakat di Kantor Perwakilan Ombudsman RI
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025



Tabel 7
 Jumlah Akses Masyarakat di Kantor Perwakilan Ombudsman RI
 Per-Kanal Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025

No	Kanal Akses	Jumlah
1	Surat	88
2	Datang Langsung	87
3	Email	1
4	Call Center 137	0
5	Telepon	9
6	Website	10
7	Media Sosial	0
8	Whatsapp	243
9	PVL OTS	710
10	SP4N-LAPOR!	0
11	Investigasi Inisiatif	1
Total		1.149

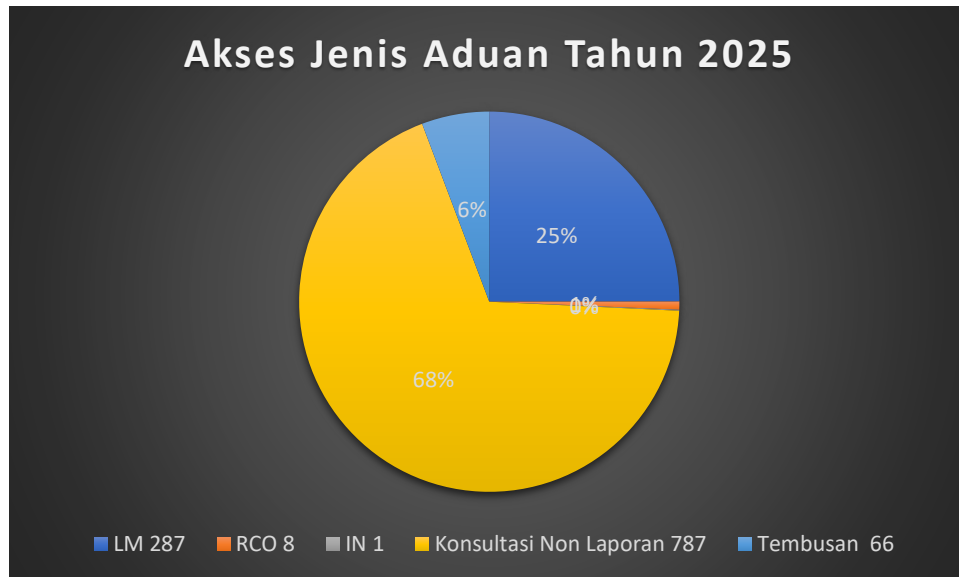
Grafik 2
 Jumlah Akses Masyarakat di Kantor Perwakilan Ombudsman RI
 Per-Kanal Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025



Tabel 8
 Jumlah Akses Masyarakat di Kantor Perwakilan Ombudsman RI
 Per-Jenis Aduan
 Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025

No	Jenis Akses	Jumlah
1	LM	287 Aduan
2	Respon Cepat Ombudsman (RCO)	8 Aduan
3	IN	1 Aduan
4	Konsultasi Non Laporan	787 Aduan
5	Tembusan	66 Aduan
Total		1.149 Aduan

Grafik 3
Jumlah Akses Masyarakat di Kantor Perwakilan Ombudsman RI
Per-Jenis Aduan
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025



a. Jumlah dan macam laporan yang diterima, dan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan formil dan materiil, diteruskan/diproses pada tahap pemeriksaan, dan diteruskan/diproses pada tahap resolusi monitoring.

Pada tahun 2025, dari 1.149 aduan terdapat sekitar 26% aduan yang masuk menjadi laporan dengan rincian mekanisme laporan reguler sebanyak 287 aduan dan Respon Cepat Ombudsman sebanyak 8 aduan. Terhadap laporan tersebut telah dilakukan pembahasan verifikasi formil dan materil pada rapat perwakilan sebanyak 36 kali selama tahun 2025. Laporan yang dilakukan verifikasi formil dan materil tidak selalu memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti pada tahap pemeriksaan karena ada beberapa laporan tidak lulus verifikasi sehingga ditolak dan dilakukan penutupan pada tahap PVL. Berikut kami sajikan tabel dan statistik hasil verifikasi formil dan materil 287 laporan (LM) selama tahun 2025.

Tabel 9
Jumlah Penerimaan dan Penutupan Laporan Ombudsman RI
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025

Jumlah Penerimaan	Jumlah Penutupan Laporan		Jumlah diteruskan ke tahap resmon
	PVL	Pemeriksaan	
287 LM (5 laporan masih dalam proses verifikasi)	59 laporan	182 Laporan	-

Tabel 10
Jumlah Penerimaan dan Penutupan Laporan Ombudsman RI
Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Syarat Formil dan Materil
pada Tahun 2025

Jumlah Penerimaan di PVL	Jumlah Penutupan di PVL	Jenis Penutupan di PVL			Keterangan
		Laporan Dicabut	Tidak memenuhi syarat formil	Tidak memenuhi syarat materil	
287 Laporan	59 Laporan	4	11 Laporan	44 Laporan	-

1. Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan

Tabel 11

Jumlah Penerimaan dan Penutupan Laporan Ombudsman RI
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025

Jumlah Penerimaan	Jumlah Penutupan Laporan		Jumlah diteruskan ke tahap resmon
	PVL	Pemeriksaan	
287	59	208 Laporan (register 2023: 2 register 2024: 14 register 2025: 192)	-

2. Keasistenan Pemeriksaan Laporan

a. Capaian Kinerja Pemeriksaan Tahun 2025

Sebagai tolok ukur kinerja, keasistenan pemeriksaan berpedoman pada perjanjian kinerja kepala perwakilan kepada Ketua Ombudsman RI. Merujuk pada hal tersebut, berikut kami sajikan tabel capaian target pemeriksaan dengan berpedoman pada perjanjian kinerja kepala perwakilan tahun 2025 dan metode perhitungan capaian berdasarkan mekanisme pengukuran capaian kinerja dari Ombudsman RI.

Tabel 12
 Persentase capaian kinerja pemeriksaan tahunan 2025

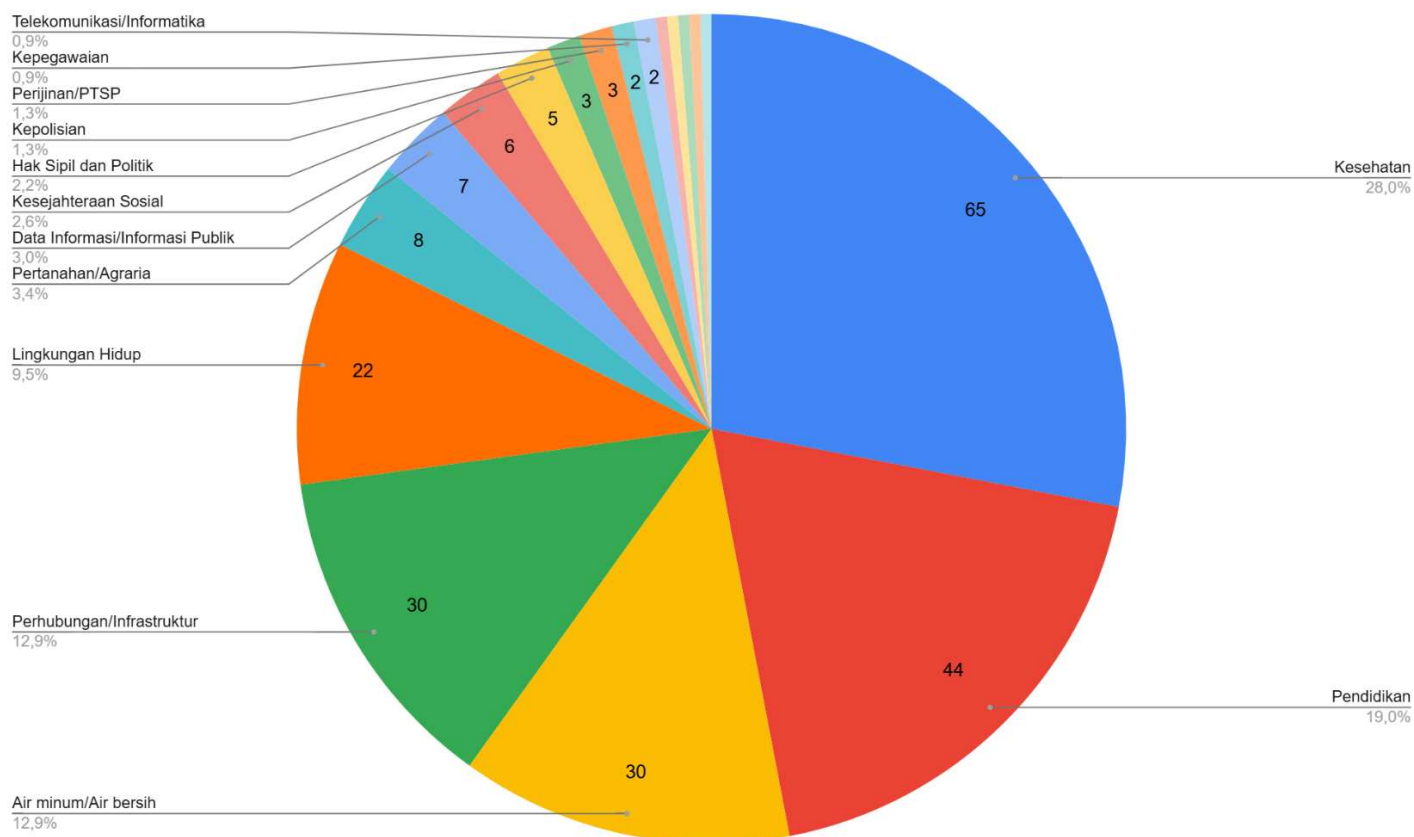
No. Urut	Indikator Kinerja	Target/Satuan	Realisasi Total (%)	Capaian pada TW I	Capaian pada TW II	Capaian pada TW III	Capaian pada TW IV
1	Persentase Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat	225	0%	Riksa: 43	Riksa: 10	Riksa: 64	Riksa: 91
2	Jumlah laporan/pengaduan IAPS Ombudsman RI Perwakilan yang dilaksanakan Penyelenggaraan Yanlik	1 IAPS	100%	0	0	1	0

Berikut penyajian statistik substansi laporan pada tahap pemeriksaan selama tahun 2025:

Tabel 13
Substansi laporan tahap pemeriksaan tahun 2025

No	Substansi Laporan	Jumlah
1	Kesehatan	65
2	Pendidikan	44
3	Air minum/Air bersih	30
4	Perhubungan/Infrastruktur	30
5	Lingkungan Hidup	22
6	Pertanahan/Agraria	8
7	Data Informasi/Informasi Publik	7
8	Kesejahteraan Sosial	6
9	Hak Sipil dan Politik	5
10	Kepolisian	3
11	Perijinan/PTSP	3
12	Kepegawaian	2
13	Telekomunikasi/Informatika	2
14	Administrasi Kependudukan	1
15	Kelistrikan	1
16	Perbankan (jasa keuangan)	1
17	Pemukiman/Perumahan	1
18	Jaminan Sosial	1
Total Laporan		232 Laporan

Grafik 4
Substansi laporan tahap pemeriksaan Tahun 2025



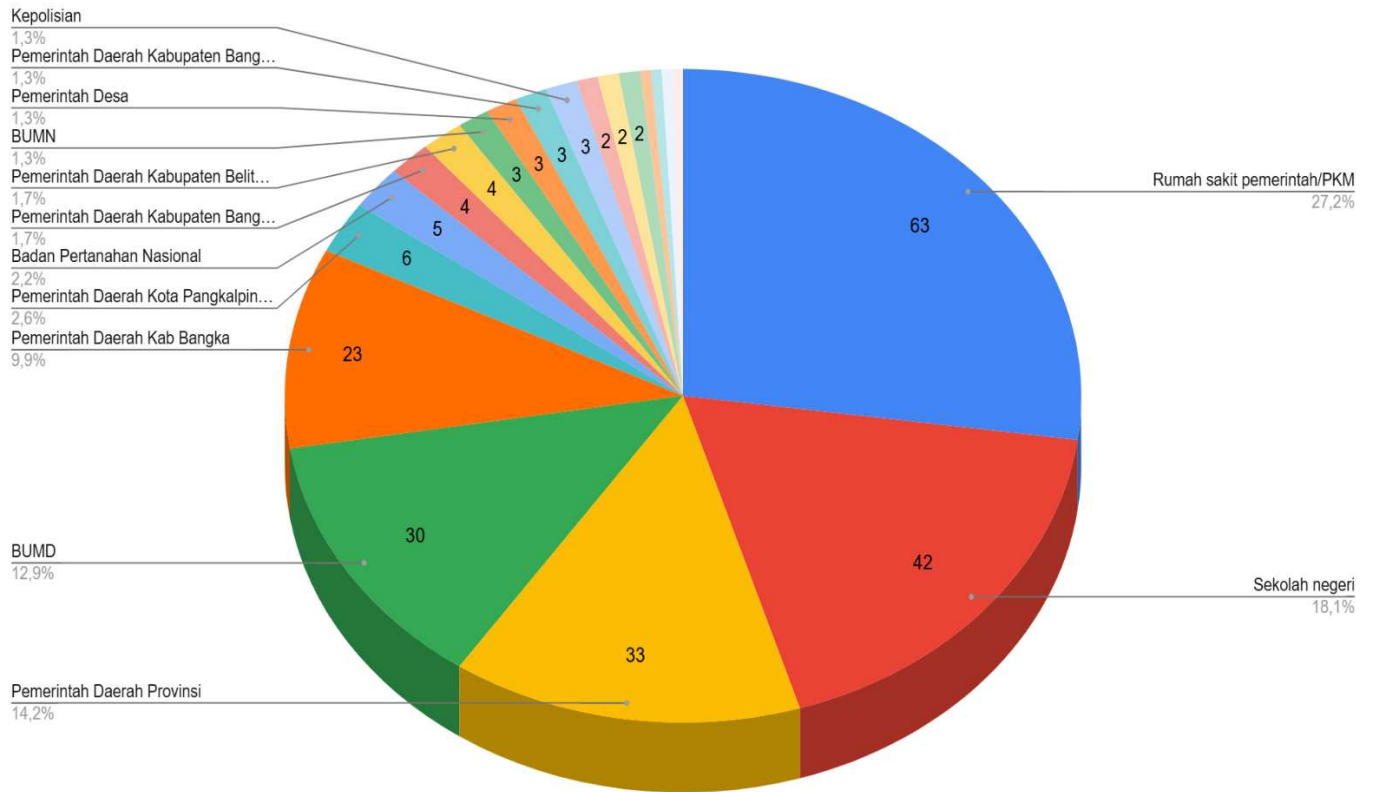
Dilihat dari kategori kelompok instansi Terlapor kami sajikan pada tabel dan grafik sebagai berikut:

Tabel 14

Kelompok Instansi Terlapor Pada Tahap Pemeriksaan Tahun 2025

No	Substansi Laporan	Jumlah
1	Rumah sakit pemerintah/PKM	63
2	Sekolah negeri	42
3	Pemerintah Daerah Provinsi	33
4	BUMD	30
5	Pemerintah Daerah Kab Bangka	23
6	Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang	6
7	Badan Pertanahan Nasional	5
8	Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan	4
9	Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur	4
10	BUMN	3
11	Pemerintah Desa	3
12	Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat	3
13	Kepolisian	3
14	BHMN	2
15	Komisi Negara/LNS	2
16	Rumah sakit/klinik swasta	2
17	Badan Pusat Statistik	1
18	Kelurahan	1
19	Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah	1
20	DPRD Tingkat Provinsi	1
Total Laporan		232 Laporan

Grafik 5
Kelompok Instansi Terlapor Pada Tahap Pemeriksaan Tahun 2025



b. Penutupan Laporan Tahap Pemeriksaan Triwulan IV 2025

Pada tahap pemeriksaan, salah satu capaian kinerja adalah penutupan laporan. Selama tahun 2025, keasistenan pemeriksaan telah mengeluarkan 208 Berita Acara Penutupan Laporan (BAPL) dengan detail BAPL yang diterbitkan sebagai berikut:

Tabel 15
BAPL Tahapan Riksa Tahun 2025

Jumlah BAPL	Register Laporan		
	2023	2024	2025
208	2	14	192

Sedangkan penutupan laporan tahap pemeriksaan dengan register 2025 didominasi dengan alasan telah mendapat penyelesaian. Hal ini dikarenakan dengan optimalisasi focal point dan nara hubung instansi penyelenggara pelayanan publik di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berikut kami sajikan juga tabel alasan penutupan laporan pada tahap riksa

Tabel 16
Alasan Penutupan Laporan Tahap Pemeriksaan Tahun 2025

Tahun Register	Alasan Penutupan Laporan			
	Tidak Ditemukan Maladministrasi	Telah Mendapat Penyelesaian Pada Tahap Pemeriksaan	Pemeriksaan Substantif Dihentikan	Ditemukan Maladministrasi tapi telah melaksanakan tindakan korektif
2023	0	2	0	0
2024	0	9	3	2
2025	31	156	5	0

3. Keasistenan Pencegahan Maladministrasi

a. Pelaksanaan Kajian Kebijakan Pelayanan Publik

Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada triwulan IV Tahun 2025 untuk tindak lanjut kajian sudah rampung 100% diselesaikan. Tim Kerja Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Perwakilan Ombudsman RI Kepulauan Bangka Belitung sudah melakukan penyerahan Laporan Hasil Analisis Kajian “Tata Kelola Sampah Rumah Tangga Berkelanjutan di Kabupaten Bangka Selatan” pada tanggal 24 Oktober 2025 dan sudah melakukan monitoring pelaksanaan saran kajian pada 08 Desember 2025 serta akan terus memantau penerapan pelaksanaan kajian yang belum direalisasikan terhitung sejak 3 bulan setelah penyerahan Laporan Hasil Analisis Kajian.

b. Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik (P4)

Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada tahun 2025 diganti menjadi Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan Peraturan Ombudsman Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dimana bertujuan untuk menggambarkan mutu Pelayanan Publik, mengukur kepercayaan masyarakat, memetakan potensi maladministrasi, mendorong perbaikan layanan, serta meningkatkan kesadaran hukum dan keadilan pada setiap unit pelayanan publik baik di pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah. Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025 sudah selesai dilaksanakan. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Tahun 2025 yaitu kegiatan bimbingan teknis tim penilai (30 September 2025 dan 06 Oktober 2025), kegiatan sosialisasi kepada kementerian/lembaga/daerah (08 Oktober 2025), pelaksanaan penilaian di pemerintah daerah/kementerian/lembaga (27 Oktober-18 November 2025), serta tahapan terakhir input data di aplikasi dan verifikasi dan finalisasi data.

c. KMPMDP (Kelompok Masyarakat yang Peduli Maladministrasi)

Tim Kerja Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah membentuk KMPMDP dengan beranggotakan 25 orang mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Universitas Bangka Belitung, Institut Agama Islam Negeri SAS Bangka Belitung, ISB Atma Luhur, Universitas Pertiba dan Institut Pahlawan 12) dan sudah dilakukan pengukuhan Komunitas Anti Maladministrasi Bangka Belitung (KMPMDP) pada tanggal 07 Oktober 2025. Pasca pengukuhan KMPMDP Bangka Belitung sudah 2 kali melakukan kegiatan *sharing session* secara daring maupun luring, bergabung dalam kegiatan pengawasan tata kelola sampah di Kabupaten Bangka Barat dan Bangka Tengah, sidak sarana dan prasarana Mal Pelayanan Publik Selawang Segantang Bangka Tengah. Untuk berikutnya di tahun 2026 akan dijadwalkan evaluasi dan pelaksanaan program kerja yang sudah disusun tim KMPMDP Bangka Belitung.

d. Focal Point Tahun 2025

Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini sedang konfirmasi terkait penunjukkan dan kesediaan untuk pelaksanaan giat *sharing session* sebagai bentuk tindak lanjut kegiatan *Focal Point* tahun 2025 yang diselenggarakan pada tanggal 09 Desember 2025. Kegiatan *Focal Point* Tahun 2025 yang bertemakan “*Revitalisasi Focal Point Pelayanan Publik: Menuju Pengelolaan Pengaduan yang Lebih Adaptif dan Responsif*” dihadiri 27 peserta dari inspektorat daerah se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta sejumlah instansi/lembaga vertikal. Kegiatan inti *Focal Point* Tahun 2025 ini adalah penyusunan dan penandatanganan Rencana Aksi *Focal Point* Tahun 2025 dimana terdapat 3 poin utama dalam rencana aksi tersebut yaitu melakukan pertemuan berkala *Focal Point* Tahun 2025 bersama Ombudsman RI Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung untuk koordinasi penyelesaian laporan masyarakat dan pencegahan maladministrasi di wilayah kerja masing-masing.

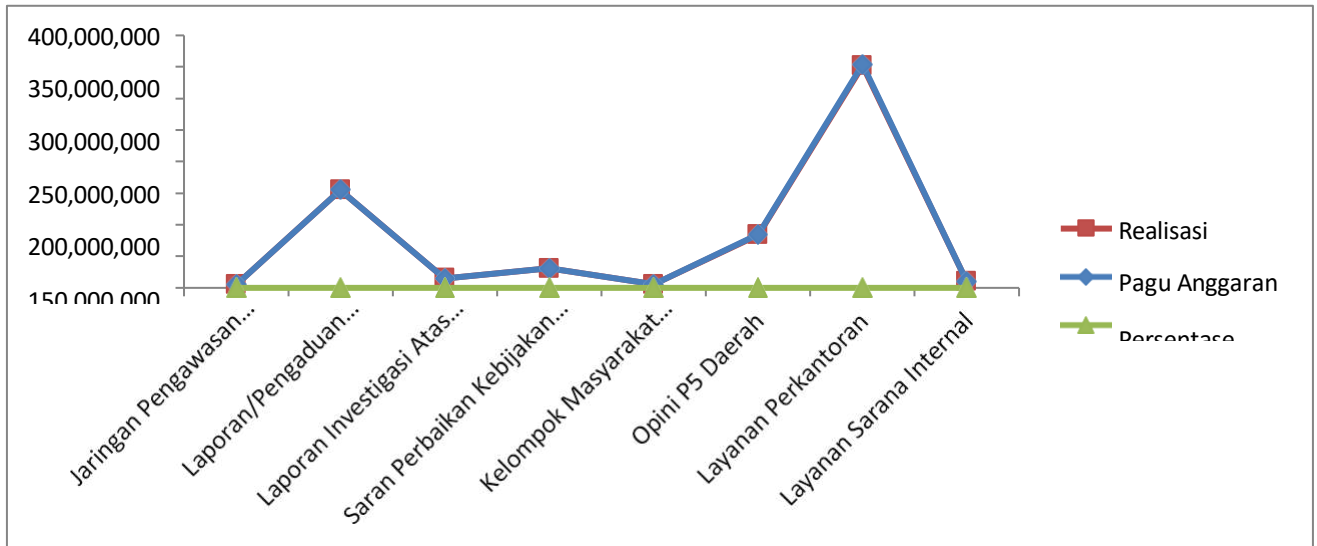
3.3 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran triwulan IV dari periode Oktober sampai dengan Desember 2025 pada Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu **Rp. 657.239.044,-** dengan persentase **99,62%** dan sisa anggaran **Rp. 2.492.991**. Rincian realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel 17 dan grafik 6 dibawah ini:

Tabel 17 : Realisasi Anggaran Tahun 2025

Kegiatan	Pagu Efektif	Realisasi Anggaran	Persentase
Jaringan Pengawasan Pelayanan Publik oleh Perwakilan	4.858.916	4.832.400	99,45%
Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan Ombudsman RI Perwakilan	155.039.577	154.992.905	99,97%
Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Perwakilan yang Dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik	15.184.262	15.157.000	99,82%
Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik	30.719.460	30.699.859	99,94%
Kelompok Masyarakat Peduli Maladministrasi di Perwakilan	5.578.950	5.562.148	99,70%
Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	84.301.448	84.111.392	99,77%
Layanan Perkantoran	354.049.422	351.883.340	99,39%
Layanan Sarana Internal	10.000.000	10.000.000	100,00%
JUMLAH	659.732.035	657.239.044	99,62%

Grafik 7 : Realisasi Anggaran Tahun 2025



1. Program Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Pada program pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik terdapat

6 pelaksanaan kegiatan yaitu:

a. Jaringan Pengawasan Pelayanan Publik oleh Perwakilan

Alokasi anggaran dalam kegiatan ini sebesar Rp. 17.942.000,- dengan blokir anggaran Rp. 13.083.084,- dan pagu efektif menjadi Rp. 4.858.916 dengan persentase realisasi 99,45%;

b. Laporan/ Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 360.027.000,- dengan blokir anggaran Rp. 204.987.423,- sehingga pagu efektif menjadi Rp. 155.039.577,- dan telah dilaksanakan kegiatan dengan persentase realisasi 99,97%;

c. Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan yang Dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik

Alokasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 36.041.000,- dengan blokir anggaran Rp. 20.856.738,- dan pagu efektif menjadi Rp. 15.184.262,- sehingga persentase realisasi 99,82%;

d. Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik

Alokasi anggaran dalam kegiatan ini sebesar Rp. 60.978.000,- dengan blokir anggaran Rp. 30.258.540,- dan pagu efektif menjadi Rp. 30.719.460,- sehingga persentase realisasi 99,94%;

e. Kelompok Masyarakat Peduli Maladministrasi di Perwakilan

Alokasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 18.867.000,- dengan blokir anggaran Rp. 13.288.050,- dan pagu efektif menjadi Rp. 5.578.950,- dengan persentase realisasi 99,70%;

f. Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah

Alokasi anggaran dalam kegiatan ini sebesar Rp. 186.488.000,- dengan blokir anggaran Rp. 102.186.552,- dan pagu efektif menjadi Rp. 84.301.448,- dengan persentase realisasi 99,77%.

2. Program Dukungan Manajemen

Dalam program dukungan manajemen terdapat 2 pelaksanaan kegiatan yaitu :

a. Layanan Perkantoran

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 398.043.000,- dengan blokir anggaran Rp. 43.993.578,- sehingga pagu efektif menjadi Rp. 354.049.422,- dan sampai dengan triwulan IV telah dilaksanakan kegiatan dengan persentase realisasi 99,39%;

b. Layanan Sarana Internal

Belanja modal peralatan dan mesin dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- dan blokir anggaran Rp. 0,- sehingga pagu efektif menjadi Rp. 10.000.000,- persentase realisasi 100%.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja pada berbagai perspektif, sasaran strategis, dan indikator keberhasilan. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas kedepannya Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan berbagai kewajiban yang diembannya dalam pengawasan pelayanan publik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Perbaikan dalam sektor pelayanan publik merupakan pekerjaan besar yang berkelanjutan dan memiliki tantangan yang semakin dinamis mengikuti perkembangan waktu. Untuk itu, kedepannya Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memerlukan dukungan dari semua pihak, termasuk masyarakat sebagai pengguna layanan publik, instansi penyelenggara pelayanan publik dalam merespon tindak lanjut kedepannya Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Laporan mitra kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Bangka Belitung dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Provinsi Bangka Belitung. Diharapkan kedepannya Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat lebih banyak melakukan sosialisasi agar dapat lebih dikenal masyarakat sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik yang bersifat independen. Sangat disadari bahwa laporan ini belum sempurna, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat memperoleh gambaran kinerja yang telah dicapai Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2025. Di masa mendatang, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan melakukan berbagai langkah untuk lebih mempercepat peningkatan kualitas kinerja dan pelaporannya agar terwujud pelayanan publik yang makin berkualitas sebagai bagian peningkatan kesejahteraan masyarakat.

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Shulby Yozar Ariadhy
Jabatan : Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Mokhammad Najih
Jabatan : Ketua Ombudsman Republik Indonesia
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja tahun 2025 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkal Pinang, Januari 2025

KETUA
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

Mokhammad Najih

KEPALA PERWAKILAN
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG,

Shulby Yozar Ariadhy

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya penyelesaian laporan/ pengaduan masyarakat yang efektif	Jumlah <i>focal point</i> pengawasan pelayanan publik yang dikembangkan oleh perwakilan	1 Lembaga
	Jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang diselesaikan Ombudsman RI Perwakilan	225 Laporan
	Jumlah Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Perwakilan yang dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik	1 Laporan
Terwujudnya penguatan pencegahan maladministrasi guna perbaikan pelayanan publik	Jumlah saran perbaikan kebijakan pelayanan publik yang dikeluarkan	1 Saran Kebijakan
	Jumlah kelompok masyarakat yang terlibat aktif dalam upaya pencegahan maladministrasi	1 Kelompok Masyarakat
	Jumlah Pemerintah daerah yang dinilai atas Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	8 Pemerintah Daerah
Terwujudnya dukungan manajemen kelembagaan Ombudsman yang kuat	Jumlah layanan pengelolaan operasional dan pemeliharaan kantor	1 Layanan
	Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	1 Paket

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	ANGGARAN
Program Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	
Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat	
Output 1: Jaringan Pengawasan Pelayanan Publik oleh Perwakilan	Rp 22.596.000
Output 2: Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan Ombudsman RI Perwakilan	Rp 360.027.000
Output 3: Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Perwakilan yang Dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik	Rp 36.022.000
Pencegahan Maladministrasi	
Output 1: Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik	Rp 52.260.000
Output 2: Kelompok Masyarakat Peduli Maladministrasi di Perwakilan	Rp 22.950.000
Output 3: Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Rp 176.488.000
Program Dukungan Manajemen	
Sumber Daya Manusia, Perlengkapan, dan Kerumahtanggaan	
Output 1: Layanan Perkantoran	Rp 392.501.000
Output 2: Layanan Sarana Internal	Rp 10.000.000
Total	Rp 1.072.844.000

Pangkal Pinang, Januari 2025

KETUA
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,



Mokhammad Najih

KEPALA PERWAKILAN
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG,



Shulby Yozar Ariadhy

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Efektif	Jumlah <i>focal point</i> pengawasan pelayanan publik yang dikembangkan oleh perwakilan	1 Lembaga
	Jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang diselesaikan Ombudsman RI Perwakilan	225 Laporan
	Jumlah Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Perwakilan yang dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik	1 Laporan
Terwujudnya Penguatan Pencegahan Maladministrasi Guna Perbaikan Pelayanan Publik	Jumlah saran perbaikan kebijakan pelayanan publik yang dikeluarkan	1 Saran Kebijakan
	Jumlah kelompok masyarakat yang terlibat aktif dalam upaya pencegahan maladministrasi	1 Kelompok Masyarakat
	Jumlah Pemerintah daerah yang dinilai atas Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	4 Pemerintah Daerah
Terwujudnya Pengelolaan Perlengkapan dan Kerumahtangaan yang Berkualitas	Jumlah layanan pengelolaan operasional dan pemeliharaan kantor	1 Layanan
	Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	1 Paket

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/ OUTPUT	ANGGARAN (Rp.)		
		PAGU	BLOKIR	EFEKTIF
I	Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik			
A	Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat			
1	Jaringan Pengawasan Pelayanan Publik oleh Perwakilan	17.942.000	13.083.084	4.858.916
2	Laporan/ Pengaduan Masyarakat ke Ombudsman RI Perwakilan yang Diselesaikan	360.027.000	204.987.423	155.039.577
3	Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Perwakilan yang	36.041.000	20.856.738	15.184.262

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/ OUTPUT	ANGGARAN (Rp.)		
		PAGU	BLOKIR	EFEKTIF
	Dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik			
B Pencegahan Maladministrasi				
1	Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik	60.978.000	30.258.540	30.719.460
2	Kelompok Masyarakat Peduli Maladministrasi di Perwakilan	18.867.000	13.288.050	5.578.950
3	Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	186.488.000	102.186.552	84.301.448
II Dukungan Manajemen				
A Sumber Daya Manusia, Perlengkapan, dan Kerumahtangaan				
1	Layanan Perkantoran	398.043.000	43.993.578	354.049.422
2	Layanan Sarana Internal	10.000.000	0	10.000.000
	Total	1.088.386.000	428.653.965	659.732.035

Jakarta, Desember 2025

KETUA
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

KEPALA PERWAKILAN
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG,

ttd.



Mokhammad Najih

Shulby Yozar Ariadhy